



LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2023. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2023, maka kami menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 sekaligus sebagaimana media Pertanggungjawaban Publik bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome. Di sisi lain, penyusunan LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 juga dimaksudkan sebagai penegasan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar pelaksanaan Good Governance.

Penyusunan LKj didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj KPU Kabupaten Pandeglang ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan Peningkatan dalam hal perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Evaluasi internal dan Capaian Kinerja, kami berusaha melaporkan target yang harus dicapai sesuai Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi KPU. Selain itu Penyusunan LKj ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.



Diharapkan dengan adanya LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dimasa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi untuk peningkatan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagai penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel.

Pandeglang, Januari 2024

KETUA,

NUNUNG NURAZIZAH



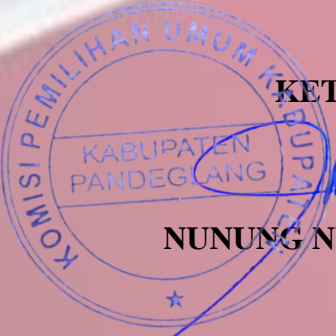
IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan selama satu tahun, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah disusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2023.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka good governance di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan kinerja ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023.

Kami berharap melalui pelaporan kinerja, dapat terlihat sasaran kegiatan yang telah tercapai maupun yang belum dapat diraih, sehingga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang diharapkan dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang.

KETUA,

NUNUNG NURAZIZAH



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. INFORMASI UMUM ORGANISASI	2
	C. TUJUAN PELAPORAN KINERJA	9
	D. SISTEMATIKA	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	10
	A. RENCANA STRATEGIS	10
	B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	12
	C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	21
	A. CAPAIAN KINERJA ORGNISASI	21
	B. DUKUNGAN SARANA PRASARANA LOGISTIK	23
	C. CAPAIAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	24
	D. PEMBENTUKAN BADAN AD HOC	25
	E. KIRAB PEMILU	40
	F. AKUNTABILITAS KEUANGAN	51
BAB IV	PENUTUP	61
	A. KESIMPULAN	61
	B. SARAN	61



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Disamping itu, Undang- Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang memberikan tugas dan wewenang kepada KPU dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat.

Sebagai lembaga non struktural, pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya, dibiayai dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kabupaten Pandeglang berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Laporan Kinerja KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pandeglang atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LK memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pandeglang selama Tahun Anggaran 2023, setiap capaian kinerja (performance results) tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pandeglang selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil, guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. INFORMASI UMUM ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas KPU pada awalnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, namun dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan tugas KPU diatur dalam Undang-Undang ini. Guna pelaksanaan tugas menyelenggarakan Pemilu, KPU terdiri dari KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hirarkhis dan tetap.

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, antara lain mengatur tentang kedudukan, kewajiban dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Kedudukan dan Tugas

Sebagai bagian hirakhi dari KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai Lembaga non struktural, yang mempunyai tugas sebagai berikut :



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah daerah, menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

2. Kewenangan

KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 19 UU nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Pasal 20 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten /Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan, perundang- undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten Pandeglang dibantu oleh Sekretariat dan dipimpin oleh Sekretaris

4. Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa “Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan empat orang anggota”, dengan struktur organisasi.

Lebih lanjut pada pasal 33 ayat (1) “Anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

dan Korwil. Pembagian Divisi dan Korwil tersebut ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pembagian divisi pada KPU Kabupaten Pandeglang sebagaimana dilejaskan pada sala 33 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- 2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; 3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- 4) Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- 5) Divisi Hukum dan Pengawasan.

Lebih rinci, pembagian divisi dan tugas KPU Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- 1) Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
- 2) Protokol dan Persidangan;
- 3) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara
- 4) Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan
- 5) Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah / janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
- 7) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- 1) Sosialisasi Kepemiluan;
- 2) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
- 3) Publikasi dan Kehumasan;
- 4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan;



Laporan Kinerja

KPU Kabupaten Pandeglang 2023

- 5) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
- 6) Kerjasama antar Lembaga;
- 7) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- 8) Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;
- 9) Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
- 10) Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin organisasi;
- 11) Diklat dan Pengembangan SDM;
- 12) Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan
- 13) Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

3. *Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:*

- 1) menjabarkan program dan anggaran;
- 2) Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program dan anggaran;
- 4) Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih;
- 5) Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
- 6) Pengelolaan Aplikasi dan jaringan teknologi dan
- 7) informasi; dan
- 8) Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;

4. *Divisi Teknis Penyelenggaraan Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:*

- 1) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- 2) Verifikasi Partai Politik dan anggota DPD;
- 3) Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- 4) Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara;
- 5) Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil- hasil pemilu dan Pemilihan;
- 6) Pelaporan Dana Kampanye; dan
- 7) Penggantian antar waktu anggota DPRD.



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

5. Divisi Hukum dan Pengawasan Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Telaah Hukum dan advokasi hukum;
- 3) Dokumentasi dan publikasi hukum;
- 4) Pengawasan dan Pengendalian internal;
- 5) Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- 6) Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Gambar 4. Struktur Organisasi
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG





Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

C. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Pandeglang telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2020-2024. Rencana Strategis dimaksud ditetapkan dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

Sebagai lembaga yang bersifat hierarki dan sebagai bagian satuan kerja dari KPU RI, Rencana strategis yang disusun KPU Kabupaten Pandeglang merupakan bagian dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh KPU RI yang akan diwujudkan KPU Kabupaten Pandeglang dalam menunjang tercapainya Rencana Strategis KPU.

Pada penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kerja Tahun 2023, Rencana Strategis KPU RI 2020-2024 masih dalam proses penyusunan yang kemudian ditetapkan pada tanggal 13 April 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 197/PR.01.3-Kpt/I/KPU/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Oleh karena, Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 masih mengacu pada rencana strategis sebelumnya.

Ringkasan atau ikhtisar dari Rencana Strategis KPU Kabupaten Pandeglang 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. VISI dan MISI

KPU Kabupaten Pandeglang telah menetapkan visi dalam menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Pandeglang, yaitu: “menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”. Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional, sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam bidang politik kepemiluan.

Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang merumuskan misi berupa rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Rumusan Misi KPU Kabupaten Pandeglang 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- c) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- d) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

- e) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, KPU Kabupaten Pandeglang menetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

- a) Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Pandeglang yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e) Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Dalam RPJM disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM KPU Kabupaten Pandeglang tersebut, maka sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 - 2024) adalah sebagai berikut :



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

- a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- 1) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - 2) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - 3) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - 5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- 1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - 2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - 3) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - 4) Opini BPK atas LHP;
 - 5) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - 6) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan, Bupati dan Wakil Bupati.
- c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- 1) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - 2) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang.

B. PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

(KKN). Pemerintah telah giat berupaya untuk mencegah pemberantasan korupsi dengan berbagai strategi yang sangat jelas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi ini sejalan dengan komitmen pemerintah.



Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan Pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desing Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan terciptanya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

B.1. MAKSUD DAN TUJUAN

- a). Dalam rangka pencapaian sasaran reformasi birokrasi, maka KPU Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan KPU Kabupaten Pandeglang menuju Zona Integritas.
- b). Mewujudkan Pelayanan yang Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c). Membangun KPU Kabupaten Pandeglang menjadi unit kerja yang melaksanakan Zona Integritas serta WBK dan BBM.



B.2. DASAR HUKUM

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
- c) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- d) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

h) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 130/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan Satuan Kerja Sebagai *Pilot Project* Implementasi Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252/PW.02-SD/11/2023 perihal Perencanaan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bentuk konkret dalam melaksanakan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang,

melaksanakan Kegiatan apel dengan tema kegiatan Pencanaan dan Pembangunan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang serta Pembacaan dan Penandatanganan Pakta Integritas.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bentuk Kontrak Kerja pada setiap Divisi dilingkungan KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 kepada Pemerintah dan di pertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja.



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Gambar B.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Data Pemilih yang terkini	Persentase KPU Kabupaten Pandeglang yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang	B
		Persentase opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten Pandeglang	WTP
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Pandeglang	79
		Persentase unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM KPU Kabupaten Pandeglang	75%
		Persentase KPU Kabupaten Pandeglang yang laporan sesuai dengan SAP	100%
3	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pandeglang yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan KPU Kabupaten Pandeglang terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali

Gambar B.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
DIVISI KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	persentase keberhasilan distribusi logistik pemilu / pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Pandeglang	100%
2	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Presentasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU Kabupaten Pandeglang	90%
		persentase jumlah KPU Kabupaten Pandeglang yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	100%

Gambar B.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Pandeglang yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	100%
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Pandeglang	75%
		Persentase tercapainya target kinerja KPU Kabupaten Pandeglang yang sesuai dengan perjanjian kinerja	90%



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Gambar B.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

**DIVISI PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT,
DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Yang Berkompeten	Presentasi Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi Penugasannya Di KPU Kabupaten Pandeglang	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana Dan Perasaan Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Presentasi Tersedianya Sarana Dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi Dengan Baik	100%
3	Terwujudnya kebersamaan dengan lembaga penyelenggaraan keuangan	Jumlah fasilitasi kerja sama KPU Kabupaten Pandeglang dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan Demokrasi	5 Kegiatan

Gambar B.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

No	Sasaran Prgram / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundangan-undangan	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Pandeglang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase produk hukum yagn dikelola dan didokumentasikan sesuai praturan perundang-undangan oleh KPU Kabupaten Pandeglang	100%
		Persentase informasi produk hukum yagn disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Kabupaten Pandeglang	94%



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 pada prinsipnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran. Dengan demikian, pencapaian kinerja kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian Indikator Kinerja Utama sebagai capaian yang tuangkan kedalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Gambar A1 : Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN 1 : Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	
persentase keberhasilan distribusi logistik pemilu / pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Pandeglang	100 %
SASARAN 2 : terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	
Presentasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU Kabupaten Pandeglang	90 %
persentase jumlah KPU Kabupaten Pandeglang yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	100 %
SASARAN 3 : Terwujudnya Data Pemilih yang terkini	
Persentase KPU Kabupaten Pandeglang yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
SASARAN 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang	B
Persentase opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten Pandeglang	WTP
Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Pandeglang	79
Persentase unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM KPU Kabupaten Pandeglang	75%
Persentase KPU Kabupaten Pandeglang yang laporan sesuai dengan SAP	100%



Laporan Kinerja

KPU Kabupaten Pandeglang 2023

SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN 5 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pandeglang yang efektif dan efisien	
Jumlah Revisi yang dilakukan KPU Kabupaten Pandeglang terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
SASARAN 6 : Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	
Persentase kpu kabupaten paneglang yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	100%
SASARAN 7 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	
Persentase laporan monitorig dan efaluasi yang di lakukan secara akun tabel dan tepat waktu oleh kpu kapupaten paneglang	100%
Presentase tercapainya target kinerja KPU kabupaten pandeglang yang sesuai dengan perjanjian kinejra	90%
SASARAN 8 : Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompten	
Presentasi kesesuaian kompentensi pegawai tehada standar kopentensi penugasannya DI KPU kabupaten pandeglan	100%
SASARAN 9 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	
Persentase tersedianya dan sarana dan perasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfugsi dengan baik	100%
SASARAN 10 : Terwujudnya kebersamaan dengan lembaga penyelenggaran Keuangan	
Jumlah fasilitasi kerja sama KPU kabupaten pandeglan dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagan demokrasi	5 kegiatan
SASARAN 11 : Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU serta pendemokrasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan	
Persentase rancangan keputusan KPU kabupaten pandeglan yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesui dengan keragka regulasi KPU	100%
SASARAN 12 : Meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	
Persentase produk hukum yang di kelola dan di dokumentasikansesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU kabupaten pandeglang	100%
Persentase informasi produk hukum yang di sajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU kabupaten pandeglang	100%



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Analisis dan evaluasi Sebagaimana Sasaran dan Indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 diatas sekiranya perlu dijabarkan lebih luas lagi sebagaimana dibawah ini :

B. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA LOGISTIK PEMILU

Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, serta Pemilu Anggota DPRD Provinsi

dan DPRD serta Pemilihan yang

serentak,

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Pandeglang sebagai salah satu lembaga yang berperan penting untuk menyelenggarakan proses tahapan pada penyelenggaraan

Pemilu di tingkat Kabupaten

Pandeglang serta berkewajiban

untuk mempersiapkan dan mensukseskan pelaksanaan

Pemilu tersebut, salah satunya adalah menyediakan logistik

Pemilu. Sehubungan dengan hal tersebut, logistik Pemilu perlu dikelola secara optimal baik pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggarannya, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi.



*Kabupaten/Kota Tahun 2019
Kepala Daerah Tahun 2020
dilaksanakan secara*



C. CAPAIAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Prinsipnya KPU Kabupaten Pandeglang memaksimalkan Daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi electoral. Dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi electoral dengan membuka ruang



seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir

NO	KECAMATAN	JML DAFTAR	DAFTAR COGLUT (PROGEL & DP)					DPH					DPHDP					DPY				
			JML TYS	L	P	L-P	JML TYS	L	P	L-P	JML TYS	L	P	L-P	JML TYS	L	P	L-P				
1	BENDUUR	7	68	9.726	9.622	19.208	69	10.014	9.920	19.952	69	9.912	9.746	19.632	69	9.891	9.729	19.621				
2	CIBANDUNG	12	111	15.088	15.100	30.088	112	15.851	15.473	31.324	112	15.096	15.207	30.303	112	15.673	15.273	30.946				
3	CIBINONG	9	86	12.829	12.212	25.041	86	12.619	12.729	25.348	86	12.489	12.620	25.109	86	12.450	12.511	24.961				
4	CIBONDONG	14	175	24.952	25.061	49.983	175	25.399	25.094	50.493	175	25.271	25.290	50.561	175	25.296	25.423	50.719				
5	CIGUGUR	9	118	14.813	15.771	28.584	118	15.433	14.706	29.779	118	15.203	14.261	29.464	118	15.111	14.279	29.390				
6	CIGUGUR	9	103	20.864	20.387	41.248	103	21.193	20.428	41.661	103	20.974	20.764	41.738	103	20.828	20.118	40.946				
7	CIGUGUR	9	83	10.107	10.101	20.208	83	11.159	10.999	22.158	83	11.109	10.921	22.030	83	11.079	10.925	22.004				
8	CIGUGUR	9	79	10.200	9.740	20.240	79	10.277	9.860	20.246	79	10.264	9.784	20.048	79	10.260	9.779	20.041				
9	CIGUGUR	13	118	13.296	14.773	28.069	118	13.613	14.790	28.403	118	13.612	14.640	28.252	118	13.618	14.626	28.244				
10	CIGUGUR	8	100	14.742	14.264	28.706	100	15.138	14.248	29.386	100	15.018	14.189	29.207	100	14.961	14.127	29.088				
11	CIGUGUR	9	116	13.138	14.803	27.941	116	13.763	14.890	28.653	116	13.620	14.739	28.359	116	13.628	14.748	28.376				
12	CIGUGUR	9	105	13.864	10.161	24.025	105	14.438	10.051	24.489	105	13.972	10.761	24.733	105	13.933	10.717	24.650				
13	CIGUGUR	12	117	15.797	15.062	30.859	117	16.738	14.799	31.537	117	15.894	14.667	30.561	117	15.923	14.644	30.567				
14	CIGUGUR	14	124	18.109	17.819	35.928	124	18.267	18.051	36.318	124	18.312	17.880	36.192	124	18.316	17.811	36.127				
15	CIGUGUR	10	89	12.862	11.973	24.835	89	13.463	11.946	25.409	89	13.327	11.479	24.806	89	13.409	11.421	24.830				
16	CIGUGUR	10	97	10.351	12.068	26.249	97	11.722	12.991	24.713	97	11.986	12.961	24.947	97	12.024	12.924	24.948				
17	CIGUGUR	10	100	11.818	10.111	21.929	100	12.261	10.268	22.529	100	12.240	10.250	22.490	100	12.292	10.761	23.053				
18	CIGUGUR	11	123	16.847	16.647	33.494	123	17.076	16.320	33.396	123	16.949	16.450	33.399	123	16.924	16.761	33.685				
19	CIGUGUR	10	100	16.296	16.450	32.746	100	16.338	16.370	32.708	100	16.327	16.287	32.614	100	16.301	16.188	32.489				
20	CIGUGUR	11	100	11.927	11.213	23.140	100	12.971	11.020	23.991	100	12.968	11.048	24.016	100	12.927	11.021	23.948				
21	CIGUGUR	4	124	16.732	16.244	32.976	124	17.088	16.142	33.230	124	16.940	16.051	32.991	124	16.938	16.007	32.945				
22	CIGUGUR	11	100	14.117	13.195	27.312	100	14.271	13.200	27.471	100	14.188	13.184	27.372	100	14.112	13.187	27.300				
23	CIGUGUR	9	74	10.294	9.880	20.174	74	10.643	10.020	20.663	74	10.499	9.960	20.459	74	10.480	9.928	20.408				
24	CIGUGUR	10	90	11.848	11.452	23.300	90	12.043	11.661	23.704	90	11.886	11.567	23.453	90	11.891	11.528	23.419				
25	CIGUGUR	11	111	14.460	13.473	27.933	111	14.460	13.473	27.933	111	14.319	13.470	27.789	111	14.300	13.450	27.750				
26	CIGUGUR	10	104	13.961	12.927	26.888	104	14.730	13.209	27.939	104	13.969	13.251	27.220	104	13.929	13.189	27.118				
27	CIGUGUR	10	84	8.889	8.261	17.150	84	9.492	8.763	18.255	84	9.384	8.647	18.031	84	9.361	8.617	18.000				
28	CIGUGUR	10	104	12.914	12.864	25.778	104	13.261	12.748	26.009	104	13.218	12.627	25.845	104	13.198	12.589	25.787				
29	CIGUGUR	10	107	16.738	16.101	32.839	107	17.143	16.101	33.244	107	16.972	16.151	33.123	107	16.923	16.108	33.031				
30	CIGUGUR	8	69	8.111	8.689	17.260	69	8.368	8.769	18.137	69	8.288	8.683	17.971	69	8.262	8.673	17.935				
31	CIGUGUR	9	79	9.664	9.211	18.875	79	9.688	9.211	18.899	79	9.528	9.261	18.789	79	9.528	9.244	18.772				
32	CIGUGUR	9	94	10.711	11.813	22.524	94	11.448	12.214	23.662	94	11.323	12.207	23.530	94	11.293	12.183	23.476				
33	CIGUGUR	12	61	8.614	7.880	16.494	61	9.764	7.887	17.651	61	9.627	7.864	17.491	61	9.612	7.841	17.453				
34	CIGUGUR	8	114	20.389	19.113	39.502	114	20.363	19.101	39.464	114	20.461	19.112	39.573	114	20.418	19.108	39.526				
35	CIGUGUR	8	110	14.844	14.813	29.657	110	15.051	15.210	30.261	110	14.818	15.094	29.912	110	14.811	14.911	29.722				
JUMLAH	339	3.752	306.138	483.003	989.141	3.750	517.991	489.267	1.007.258	3.750	512.490	485.001	997.491	3.750	511.803	484.322	996.127					

Keterangan:
1. Pencapaian Jumlah TPS Dibarengkan Terjadi Penambahan TPS Tempak Hasil CAGI Dan BARU COGLUT Di DPR
2. Pencapaian Jumlah TPS Tersebut Di Kabupaten BENDUUR, CIBANDUNG, CIBINONG, CIGUGUR, CIGUGUR

sengketa pada hari pemilihan.

KPU Kabupaten Pandeglang dalam hal Pemutakhiran Data Pemilih cukup membanggakan meraih beberapa Prestasi capaiannya yaitu :

1. Pemilu Tahun 2014 Meraih Pemutakhiran Data Pemilih TERBAIK Secara Nasional
2. Pemilu Tahun 2019 Meraih Pembutakhiran Data Pemilih TERBAIK Se-Provinsi Banten dan TERBAIK ke 6 (enam) Secara Nasional
3. Pemilu Tahun 2024 Meraih Tata Kelola Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih (Pencocokan Penelitian sampai dengan Daftar Pemilih Tetap) TERBAIK Se-Provinsi Banten
4. Pemilu Tahun 2024 Meraih Tindakanj Data Invalid TERBAIK KE 2 Secara Nasional





D. PEMBENTUKAN BADAN AD HOC

1. PEMEBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

Dalam pelaksanaan Pemilu KPU memiliki cakupan wilayah yang luas, maka Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Badan *Adhoc*. Badan *Adhoc* terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan *Adhoc* dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tahapan pembentukan Badan *Adhoc*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang melaksanakan tahapan dengan aturan dasar hukum antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

7. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
8. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1198/PP.04-SD/04/2022 perihal Pemenuhan Dokumen Persyaratan PPK dan PPS Untuk Pemilu Tahun 2024.
9. Surat Dinas Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3261/PP.04-SD/04/2022 perihal Dukungan Sekretariat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan PPK, PPS dan Pantarlih Tahun Anggaran 2023.
10. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ perihal Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Pemilu 2024.
11. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/PP.04-SD/04/2023 perihal Keterlibatan PNS sebagai Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu.
12. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63/PP.04-SD/04/2023 perihal Pemenuhan Kebutuhan PPS Pasca Perpanjangan Pendaftaran PPS Tahap II pada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
13. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 64/PP.04-SD/04/2023 perihal Pembentukan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
14. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 103/PP.04-SD/04/2023 perihal Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
15. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 145/PP.04-SD/04/2023 perihal Penyesuaian Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Pantarlih untuk Pemilu 2024.
16. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 147/PP.04-SD/04/2023 perihal Jadwal Pemetaan TPS, Apel Kesiapan dan Bimtek Pantarlih.

Diawali dengan pembentukan kelompok kerja (POKJA) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 02 November 2022. Tahapan pembentukan PPK berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota antara lain :



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

1. Jadwal dan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Keputusan KPU RI, adapun Jadwal dan Tahapannya yaitu sebagai berikut :

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota PPK	20 November 2022	24 November 2022
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota PPK	20 November 2022	29 November 2022
3.	penelitian administrasi calon anggota PPK	21 November 2022	1 Desember 2022
4.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK	2 Desember 2022	4 Desember 2022
5.	seleksi tertulis calon anggota PPK	5 Desember 2022	7 Desember 2022
6.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK	8 Desember 2022	10 Desember 2022
7.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK	2 Desember 2022	10 Desember 2022
8.	wawancara calon anggota PPK	11 Desember 2022	13 Desember 2022
9.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK	14 Desember 2022	16 Desember 2022
10.	penetapan anggota PPK	16 Desember 2022	16 Desember 2022
11.	pelantikan anggota PPK	4 Januari 2023	4 Januari 2023

1. Pengumuman Pendaftaran

Pendaftaran PPK diumumkan dengan Pengumuman Nomor 274/PP.04.1-Pu/3601/2022 tanggal 20 November 2022. Pengumuman di tempel pada Kantor – Kantor Kecamatan se-Kabuapten Pandeglang serta di unggah pada website KPU Kabupaten Pandeglang.



3. Pendaftaran dan Penelitian Administrasi

Tahapan penerimaan pendaftaran dimulai dari tanggal 20 November 2022 sampai dengan 29 November 2022 melalui SIAKBA secara online. Setelah pelamar melakukan *submit* kelengkapan berkas dan mendapatkan tanda terima pendaftar, maka pelamar harus membawa berkas fisiknya dan diserahkan kepada petugas KPU. Jumlah pendaftar pada SIAKBA mencapai 1.048 dengan rincian pelamar hanya mengisi biodat sebanyak 135 pelamar, tidak lengkap mengunggah persyaratan 318 pelamar dan berkas diterima 955 pelamar (803 Laki-Laki dan 152 Perempuan).



Tahapan penelitian administrasi dimulai dari tanggal 21 November 2022 sampai dengan 1 Desember melalui SIAKBA secara online. Operator terbagi menjadi 4 yang dibagi 8 sampai 9 kecamatan dari 35 kecamatan. Penelitian Administrasi dilakukan secara online melalui SIAKBA dengan memberikan status MS dan TMS. Dari 1.048 pelamar setelah dilakukan penelitian administrasi berkurang menjadi 955 berkas yang diterima. Penelitian Administrasi dilakukan operator setelah konter penerimaan berkas fisik dari pukul 08.00 wib sampai dengan 16.00 wib ditutup.



Pukul 00.01 wib
dini hari, tanggal 2
Desember setelah di
tutupnya pendaftaran.
Maka KPU Kabupaten

Pandeglang melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 54/PP.04.1-BA/3601/2022 dengan hasil 864 orang Memenuhi Syarat dan 91 Orang Tidak Memenuhi Syarat.

4. Pengumuman Hasil Administrasi

Tahapan penerimaan pendaftaran dimulai dari tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan 04 Desember 2022. Setelah dilaksanakan Rapat Pleno maka dapat diumumkan Pengumuman Hasil Administrasi Calon Anggota PPK Kabupaten Pandeglang Nomor 311/PP.04.1-Pu/3601/2022 tanggal 3 Desember 2022. Diumumkan di website KPU Kabupaten Pandeglang.



5. Tes Tertulis dan Pengumuman Hasil Tes Tertulis

Tahapan seleksi tertulis dimulai dari tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan 07 Desember 2022. KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan tes tertulis secara CAT tanggal 06 Desember 2022 bertempat di SMKN 2 Pandeglang yang dilaksanakan mulai pukul 08.30 s.d. 17.30 WIB. Dibagi menjadi 7 Ruang dan 5 Sesi. Peserta ujian langsung dapat mengakses nilai melalui link <http://kpu.smkn2pandeglang.sch.id>. Jumlah peserta tes tertulis sebanyak 864 orang, namun ada yang tidak hadir sebanyak 37 orang *terlampir*. Sehingga peserta hadir saat ujian sebanyak 827 orang.



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Tahapan seleksi tertulis dimulai dari tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan

10 Desember 2022.

Berdasarkan Berita Acara

Pleno KPU Kabupaten

Pandeglang Nomor

56/PP.04.1-BA/3601/2022

tanggal 7 Desember 2022

dan Pengumuman Nomor

325/PP.04.1-Pu/3601/2022

tanggal 8 Desember 2022

diumumkan dengan hasil



529 orang dinyatakan Lulus dan 335 Orang dinyatakan Tidak Lulus. Sistem ini

diambil dari peringkat 1-15 (3 kali kebutuhan) untuk masuk ke tes wawancara.

Tahapan seleksi tertulis dimulai dari tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan 10

Desember 2022. Tanggapan masyarakat memberikan ruang kepada masyarakat untuk

melakukan tanggapan masyarakat terhadap pelamar dengan sarana melalui email

sdmkpupandeglang@gmail.com.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

SIKBA 14
SISTEM INFORMASI KECAMATAN KPU DAN BAZAS KEMENDIK

SURA
SULU

Pengumuman
NOMOR : 325/PP.04.1-Pu/3601/2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI TERTULIS
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

www.kab-pandeglang.kpu.go.id | kpu.pandeglangofficial | kpu.kabupaten.pandeglang | kpsikabupaten.pandeglang



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

6. Tes Wawancara dan Pengumuman Hasil Tes Wawancara

Tahapan seleksi wawancara dimulai dari tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan 13 Desember 2022 bertempat di Hotel Horison Altama Pandeglang. Dibagi menjadi 3 (tiga) hari dengan rincian 11 Desember 2022 terdiri dari 12 Kecamatan sebanyak 178 orang,

Tanggal 12 Desember terdiri 12 Kecamatan sebanyak 184 orang dan 13 Desember 2022 terdiri 11 Kecamatan sebanyak 167 orang.

Jumlah peserta 529



orang, namun yang tidak hadir 19 orang. Sehingga total yang mengikuti wawancara sebanyak 510 orang dari 35 kecamatan.

Tahapan pengumuman hasil seleksi wawancara dimulai dari tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 16 Desember 2022. Dilaksanakan Rapat Pleno dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 62/PP.04.1-BA/3601/2022 tanggal 13 Desember dengan hasil 175 Terpilih dan 175 Pengganti. Pengumuman Nomor 330/PP.04.1-Pu/3601/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan hasil 175 terpilih menjadi PPK Kabupaten Pandeglang.





Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

7. Penetapan Hasil Tes Wawancara

Tahapan penetapan anggota PPK tanggal 16 Desember 2022. Penetapan nama-nama PPK yang terpilih dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 29 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 dan dilakukan perubahan terhadap SK karena adanya Pengunduran Diri dari salah satu yang terpilih dengan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2023



8. Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah

Tahapan penetapan anggota PPK tanggal 4 Januari 2022. Berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 3261/PP.04-SD/04/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang menjelaskan pada poin 1 bahwa melaksanakan Pelantikan PPK sekaligus Bimtek PPK. Pelantikan PPK dihadiri Bupati Pandeglang, KPU Provinsi Banten, Bawaslu Pandeglang, Kejaksaan Pandeglang, dan Muspida pada Kabupaten Pandeglang.



2. PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

Setelah dilaksanakannya pembentukan PPK dilanjutkan dengan Pembentukan PPS. Tahapan pembentukan PPS berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota antara lain :



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

1. Jadwal dan Tahapan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Keputusan KPU RI, adapun Jadwal dan Tahapannya yaitu sebagai berikut :

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota PPS	18 Desember 2022	22 Desember 2022
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	18 Desember 2022	30 Desember 2022
3.	penelitian administrasi calon anggota PPS	19 Desember 2022	2 Januari 2023
4.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS	3 Januari 2023	5 Januari 2023
5.	seleksi tertulis calon anggota PPS	6 Januari 2023	11 Januari 2023
6.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS	12 Januari 2023	14 Januari 2023
7.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS	3 Januari 2023	14 Januari 2023
8.	wawancara calon anggota PPS	15 Januari 2023	17 Januari 2023
9.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS	18 Januari 2023	20 Januari 2023
10.	penetapan anggota PPS	20 Januari 2023	20 Januari 2023
11.	pelantikan anggota PPS	24 Januari 2023	24 Januari 2023

2. Pengumuman Pendaftaran PPS

Pendaftaran PPS diumumkan dengan Pengumuman Nomor 336/PP.04.1-Pu/3601/2022 tanggal 18 Desember 2022. Di unggah pada website KPU Kabupaten Pandeglang. Kemudian dilakukan perubahan Pengumuman Nomor 343/PP.04.1-Pu/3601/2022 tanggal 22 Desember 2022 atas dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.



3. Pendaftaran dan Penelitian Administrasi

Tahapan penerimaan pendaftaran dimulai dari tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 30 Desember 2022 melalui SIAKBA secara online. Setelah pelamar melakukan *submit* kelengkapan berkas dan mendapatkan tanda terima pendaftar, maka pelamar harus membawa berkas fisiknya dan diserahkan kepada petugas KPU. Jumlah pendaftar pada SIAKBA mencapai 5.009 pelamar dengan rincian berkas diterima 3.957 pelamar (2934 Laki-Laki dan 1023 Perempuan).



Tahapan penelitian administrasi dimulai dari tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023 melalui SIAKBA secara online. Operator terbagi menjadi 7 yang masing-masing 5 kecamatan dari 35 kecamatan. Penelitian Administrasi dilakukan secara online melalui Siakba dengan memberikan status MS dan TMS. Dari 5.009 pelamar setelah dilakukan penelitian administrasi berkurang menjadi 3.758 berkas yang diterima. Penelitian Administrasi dilakukan operator setelah konter penerimaan berkas fisik dari pukul 08.00 wib sampai dengan 16.00 wib ditutup.



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

KPU Kabupaten Pandeglang melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 1/PP.04.1-BA/3601/2023 dengan hasil 3.758 orang (2.794 Laki-Laki dan 964 Perempuan) Memenuhi Syarat dan 199 Orang Tidak Memenuhi Syarat.

4. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

Tahapan penerimaan pendaftaran dimulai dari tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 05 Januari 2022. Setelah dilaksanakan Rapat Pleno maka dapat diumumkan Pengumuman Hasil Administrasi Calon Anggota PPK Kabupaten Pandeglang Nomor 1/PP.04.1-Pu/3601/2023 tanggal 2 Januari 2023. Diumumkan di website KPU Kabupaten Pandeglang.



5. Tes Tertulis dan Pengumuman Hasil Tes Tertulis

Tahapan seleksi tertulis dimulai dari tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan 11 Januari 2023. KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan tes tertulis secara CAT tanggal 6,7,8 dan 9 Januari 2023 bertempat di SMKN 2 Pandeglang. Dibagi menjadi 4 hari. Peserta ujian langsung dapat mengakses nilai melalui link <http://kpu.smkn2pandeglang.sch.id>. Jumlah peserta tes tertulis sebanyak 2.831 orang.



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Tahapan seleksi tertulis dimulai dari tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 14 Januari 2023. Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 03/PP.04.1-BA/3601/2023 tanggal 11 Januari 2023 dan Pengumuman Nomor 17/PP.04.1-Pu/3601/2023 tanggal 12 Januari 2023 diumumkan dengan hasil 2830 orang dinyatakan Lulus. Sistem ini diambil dari peringkat 1-15 (3 kali kebutuhan) untuk masuk ke tes wawancara.

Tahapan seleksi tertulis dimulai dari tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan 14 Januari 2023. Tanggapan masyarakat memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan tanggapan masyarakat terhadap pelamar dengan sarana melalui email sdmkpupandeglang@gmail.com.



6. Tes Wawancara dan Pengumuman Hasil Tes Wawancara

Tahapan seleksi wawancara dimulai dari tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2023 bertempat di Seluruh Kecamatan pada Kabupaten Pandeglang. Dibagi menjadi 5 (lima) Tim selama 3 Hari pelaksanaan wawancara.





Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Dilaksanakan Rapat Pleno dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 54/PP.04.1-BA/3601/2023 tanggal 18 Januari 2023 dan Pengumuman Nomor 64/PP.04.1-Pu/3601/2023 tanggal 18 Januari 2023 dengan hasil 1.017 terpilih menjadi PPS Kabupaten Pandeglang.



7. Penetapan Hasil Tes Wawancara

Tahapan penetapan anggota PPS tanggal 20 Januari 2022. Penetapan nama-nama PPS yang terpilih dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 37 Tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022 dan dilakukan perubahan terhadap SK karena adanya Pengunduran Diri dari salah satu yang terpilih dengan Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2023.





Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

4. Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah

Tahapan penetapan anggota PPS tanggal 24 Januari 2023. Bertempat di Alun-Alun Pandeglang. Pelantikan PPS dihadiri Bupati Pandeglang, KPU Provinsi Banten, Bawaslu Pandeglang, Kejaksaan Pandeglang, dan Muspida pada Kabupaten Pandeglang, PPK dan Sekretariat PPK.





Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

E. KIRAB PEMILU TAHUN 2024

Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 merupakan salah satu hajat besar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU memiliki tanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan dengan sukses. Salah satu indikator suksesnya penyelenggaraan Pemilu adalah meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Hari Pemungutan Suara nanti.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang tugas dari Komisi Pemilihan Umum menyebutkan bahwa salah satu tugas dari KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat secara luas.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu merupakan salah satu indikator suksesnya pelaksanaan Pemilu. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh kelompok berbadan hukum ataupun non badan hukum yang diantaranya meliputi, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil.

Sejalan dengan hal tersebut, guna meningkatkan partisipasi masyarakat Komisi Pemilihan Umum melaksanakan kegiatan Kirab Pemilu 2024 yang ditandai dengan pelepasan atau pemberangkatan tim Kirab Pemilu yang mengawal bendera Partai Politik peserta Pemilu 2024 oleh Anggota KPU dan Sekretaris Jenderal KPU. Yang diluncurkan pada tanggal 14 Februari 2023, sebagai penanda Satu tahun Menjelang Pemilu Tahun 2024. Kirab Pemilu diluncurkan dari 7 (tujuh) lokasi yang berbeda, yakni KIP Aceh, KPU Kota Batam, KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Utara, KPU Kabupaten Pulau Morotai,



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

KPU Provinsi NTT, dan KPU Provinsi Papua. Tujuh lokasi ini merupakan pembagian tujuh rute yang terbagi, sehingga Kirab Pemilu secara bersamaan menyusuri dan melintasi Indonesia.

Jalur I Provinsi Aceh melintasi 44 kabupaten/kota, Jalur II Provinsi Kepulauan Riau melintasi 43 kabupaten/kota, Jalur III Provinsi Kalimantan Barat melintasi 43 kabupaten/kota, Jalur IV Provinsi Kalimantan Utara melintasi 43 kabupaten/kota, Jalur V Kabupaten Kepulauan Morotai, Provinsi Maluku Utara melintasi 44 kabupaten/kota, Jalur VI Provinsi Nusa Tenggara Timur melintasi 45 kabupaten/kota dan yang terakhir Jalur VII Provinsi Papua melintasi 43 kabupaten/kota. Tim Kirab Pemilu ini bergerak secara estafet menuju KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan rute yang telah ditetapkan hingga menuju pada satu titik, yaitu Jakarta.

Salah satu Satker yang dilalui yaitu KPU Kabupaten Pandeglang yang berada dalam Jalur II (Titik Awal Batam, Kepulauan Riau). Selama 7 (tujuh) hari Bendera Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 berada di Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilu 2024 dan Pendidikan pemilih, serta kegiatan lainnya dalam rangkaian Kirab Pemilu Tahun 2024 dengan Tema “Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa” di Wilayah Kabupaten Pandeglang yang diawali dengan serah terima Bendera Kirab Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Serang pada tanggal 11 September 2023.

KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilu Tahun 2024 dan pendidikan pemilih, serta kegiatan lainnya selama 7 (tujuh) hari yaitu dari tanggal 11 s.d 17 September 2023 untuk menyampaikan informasi mengenai 18 (Delapan Belas) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, jadwal dan tahapan Pemilu serta hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilu, cara cek DPT online dan materi kepemiluan lainnya. Kemudian pada hari senin tanggal 18 September 2023 KPU Kabupaten Pandeglang telah menyerahkan bendera Kirab Pemilu Tahun 2024 kepada KPU Kabupaten Lebak.

1. Persiapan Pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024

Bahwa agar pelaksanaan dapat berjalan dengan sukses diperlukan banyak persiapan dan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga menghasilkan berbagai



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

kesepakatan penting agar pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024 mendapat dukungan atau support dari berbagai pihak dinas/instansi atau lembaga terkait (stakeholder) dan Forkopimda, rangkaian kegiatan Persiapan Kirab Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Pandeglang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Rapat Koordinasi Persiapan Kirab Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi Banten dengan KPU Kabupaten/Kota

Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung Nurazizah, anggota KPU Kabupaten Pandeglang Falahudin didampingi Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Iwan Guhuran beserta Staf Pelaksana menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Kirab Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Banten di Aula KPU Provinsi Banten. Kegiatan Rapat Koordinasi bertujuan untuk mempersiapkan Pelaksanaan Program Nasional estafet Kirab Pemilu Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Satker KPU Kabupate/Kota guna mempedomasi Petujuk Teknis Pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024. Pada rapat ini dibahas beberapa hal diantaranya persiapan anggaran pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024, konsep kegiatan seremoni serah terima Kirab Pemilu Tahun 2024, strategi sosialisasi Pemilu tahun 2024 dan Pendidikan Pemilih serta Kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan selama rangakain Kirab Pemilu Tahun 2024.

b. Koordinasi KPU Kabupaten Pandeglang dengan Bupati Pandeglang

Pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023, Ketua KPU Pandeglang Nunung Nurazizah, Anggota KPU Pandeglang Falahudin, Restu Sugrining Umam, Rodi Herdiana dan Samsuri didampingi Sekretaris KPU Pandeglang Dina Kurnia Sari Utami serta Kasubag Keuangan Umum Rumah Tangga dan Logistik Tata Jumanta, Kasubag Hukum dan SDM Devi Yustiadi serta Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Iwan Guhuran melakukan Koordinasi Kelembagaan Ke Bupati Pandeglang. Koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Kabupaten Pandeglang ke Bupati Pandeglang merupakan langkah awal dalam upaya memperkuat sinergitas antara KPU dengan Pemerintah Daerah, agenda rapat koordinasi tersebut membahas beberapa hal diantaranya pengenalan anggota KPU Kabupaten Pandeglang Periode 2023-2028 sampai pada pembahasan penyampaian Informasi Pelaksanaan agenda Nasional Kirab Pemilu Tahun 2024 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Pandeglang pada tanggal 11 s.d 17 September 2023. Pada kesempatan itu, Bupati Pandeglang didampingi Sekretaris Daerah, ASDA I, Kepala Kesbangpol dan Kepala Diskomsantik Kabupaten pandeglang menerima dan merespon baik agenda Nasional Kirab Pemilu Tahun 2024.



c. Rapat Koordinasi Persiapan Kirab Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Pandeglang dengan Badan Adhoc PPK Se-Kabupaten Pandeglang

Pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023, KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kirab Pemilu tahun 2024 dengan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

membidangi Pj. Partisipasi Masyarakat se-Kabupaten. Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Pandeglang membahas beberapa hal teknis berkaitan dengan persiapan



pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024, diantaranya penyampaian Waktu Pelaksanaan dan Rute Kirab di wilayah Kabupaten Pandeglang, Penyampaian lokasi singgah Tim Kirab Pemilu dan pembahasan mengenai rangkaian kegiatan sosialisasi Pemilu tahun 2024 dan Pendidikan pemilih serta penegasan kepada PPK dan PPS untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih selama Pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024 kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing. Selain itu, KPU Kabupaten pandeglang memastikan kesiapan Jajaran Badan Adhoc PPK, PPS serta Sekretariat PPK dan PPS agar dapat mengikuti setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan Kirab Pemilu tahun 2024.

d. Rapat Koordinasi Persiapan Kirab Pemilu tahun 2024 KPU Kabupaten Pandeglang dengan Patai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pandeglang

Pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, KPU Kabupaten Pandeglang

mengundang Ketua Bawaslu dan Pimpinan Partai Politik Peserta pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Pandeglang untuk mengikuti kegiatan rapat Koordinasi



Persiapan



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Kirab Pemilu tahun 2024. Dalam rapat Koordinasi tersebut KPU Kabupaten Pandeglang menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan Kirab Pemilu tahun 2024 mulai dari kegiatan seremoni serah terima Kirab Pemilu dan Pelaksanaan Sosialisasi pengenalan Nomor Urut dan Bendera 18 (Delapan Belas) Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024. Rapat Koordinasi dilaksanakan bertujuan untuk mendapat kesepakatan antara KPU Kabupaten Pandeglang dan Partai Politik berkaitan dengan hal-hal Teknis pada kegiatan Serah Terima dan Pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024, kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu selama pelaksanaan Kirab berlangsung.

e. Rapat Koordinasi Persiapan Kirab Pemilu tahun 2024 KPU Kabupaten Pandeglang dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, KPU Kabupaten Pandeglang yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Pandeglang menggelar Rapat Koordinasi di Ruang Pintar Setda Pandeglang, Rapat ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Pandeglang, Asda I, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Satpol PP Pandeglang dan Kabag Ops Polres Pandeglang.

Rapat Koordinasi digelar dalam rangka memastikan ketersediaan sarana dan prasarana, mulai dari Kesiapan



Paskibraka Pembawa 18 (Delapan Belas) Bendera Partai Politik, Drumb Band,



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Tarian Rampak Bedug, Pencak Silat serta Kesiapan Tim Patwal dari Polres Pandeglang pada pelaksanaan Iring-iringan Tim Kirab Pemilu Tahun 2024. Selain itu, dibahas juga kegiatan kolaborasi Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Pandeglang dan KPU Kabupaten Pandeglang di beberapa Kecamatan selama pelaksanaan Kirab Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Pandeglang.

f. Rapat Koordinasi Persiapan Serah Terima Kirab Pemilu tahun 2024 KPU Kabupaten Pandeglang dengan KPU Provinsi Banten dan KPU Kabupaten Serang

Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan Rapat Koordinasi secara daring (Zoom Meeting) dengan KPU Provinsi Banten dan KPU Kabupaten Serang. Rapat Koordinasi digelar guna memberikan gambaran proses serah terima Kirab Pemilu Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 September 2023.

g. Monitoring dan Supervisi dari KPU Provinsi Banten

Selama masa persiapan pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024, KPU Provinsi Banten senantiasa memberikan arahan serta masukan terkait Konsep Pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024 yang akan diselenggarakan di KPU Kabupaten Pandeglang, dengan demikian realisasi kegiatan akan sejalan dengan tujuan dari Program Nasional Kirab Pemilu Tahun 2024.





Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

2. Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 dan Pendidikan Pemilih Kepada Siswa-Siswi SMA/Sederajat melalui kegiatan Apel Senin oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Pandeglang

KPU Kabupaten Pandeglang melalui Badan Adhoc/ PPK Sosialisasikan Pendidikan Pemilih dan Kepemiluan kepada 126 SMA/Sederajat Se-Kabupaten Pandeglang pada rangkaian Kirab Pemilu tahun 2024, hari Senin tanggal 11 September 2023.

PPK Se-Kabupaten Pandeglang berkesempatan menjadi Pembina Upacara Bendera Hari Senin di SMA/Sederajat untuk memberikan pemahaman kepemiluan dan pendidikan pemilih. Sejumlah 39.187 Siswa Siswi yang tersebar di 126 SMA/Sederajat diberikan pemahaman akan pentingnya memberikan hak pilih pada pada Pemilihan Umum Serentak 2024 nanti.

Pada kesempatan tersebut KPU melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten menyampaikan informasi mengenai 18 (Delapan Belas) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, jadwal dan tahapan Pemilu serta hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilu, cara cek DPT online dan materi kepemiluan lainnya.





Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

3. Serah Terima Kirab Pemilu Tahun 2024 (Senin, 11 September 2023)

Pada hari senin tanggal 11 September 2023 Mobil Kirab Bendera Merah Putih, Pataka KPU dan Bendera Partai Politik Peserta Pemilu 2024 pada pukul 10.00 WIB Berangkat dari KPU Kabupaten Serang Menuju Kabupaten Pandeglang, pada pukul 11.30 WIB sampai pada Perbatasan Kabupaten Serang dan Pandeglang disambut oleh PPK dan PPS Kecamatan cadasari dan selanjutnya ikut mengawal sampai dengan Alun-Alun Kabupaten Pandeglang dimana kegiatan Serah Terima Bendera Kirab akan dilaksanakan. dalam kegiatan serah terima ini dihadiri oleh :

1. Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kabag serta Kasubag KPU Provinsi Banten;
2. Bupati Kabupaten Pandeglang;
3. Kapolres Kabupaten Pandeglang;
4. Dandim 0601 Pandeglang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang;
6. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang;
7. Sekda Kabupaten Pandeglang;
8. Asda I Kabupaten Pandeglang;
9. Komisioner dan Sekretaris Bawaslu Provinsi Banten;
10. Komisioner dan Sekretaris Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
11. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;
12. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pandeglang;
13. Ketua MUI Kabupaten Pandeglang;
14. Perwakilan Disdukcapil Kabupaten Pandeglang;
15. Perwakilan Disdikpora Kabupaten Pandeglang;
16. Perwakilan Diskonsantik Kabupaten Pandeglang;
17. Kepala Disparbud Kabupaten Pandeglang;
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang;
19. Kepala Satpol PP Kabupaten Pandeglang;



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

20. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Pandeglang;
21. Kabag Humas dan Prokopim Setda Kabupaten Pandeglang;
22. Ketua PPI Kabupaten Pandeglang;
23. Camat Sekabupaten Pandeglang;
24. 46 Kepala Desa;
25. Ketua Apdesi Kabupaten Pandeglang;
26. Abuya K.H Ahmad Muhtadi;
27. Ketua, Pengurus dan Anggota 18 Partai Politik;
28. Pimpinan 9 Perguruan tinggi di Kabupaten Pandeglang;
29. Ketua PWI, Forwan, Forwin, SMSI, IJTI, IWO Kabupaten Pandeglang;
30. Ketua NU, Muhammadiyah, MA Kabupaten Pandeglang;
31. Ketua KNPI, Karang Taruna Kabupaten Pandeglang;
32. Forum Bem Sekabupaten Pandeglang;
33. Ketua HMI, IMM, PMII, GMNI Kabupaten Pandeglang;
34. Ketua LMND, JRDP, JRPP Kabupaten Pandeglang;
35. PPK, PPS beserta Sekretariat;
36. Siswa SMA sederajat dari 5 Sekolah.

4. Serah Terima Kirab Pemilu Tahun 2024 Jalur II dari KPU Kabupaten Pandeglang Ke KPU Kabupaten Lebak (Senin, 18 September 2023)

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023, dimulai pada pukul 13.00 WIB Tim Kirab Pemilu Tahun 2024 bergerak menuju Kabupaten Lebak untuk melaksanakan kegiatan Serah Terima Kirab Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Pandeglang Ke KPU Kabupaten Lebak, bertempat di Pendopo Bupati Kabupaten Lebak.

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang didampingi Sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang menyerahkan secara langsung Kirab Pemilu Tahun 2024 kepada Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Lebak. sejumlah 18 (Delapan Belas) Bendera Partai Politik Peserta Pemilu, Pusaka Bendera KPU dan Bendera Merah Putih dalam keadaan lengkap dan baik, untuk selanjutnya di serahkan ke KPU Kabupaten Lebak.

Proses Perjalan Kirab Pemilu Bulan September Tahun 2023



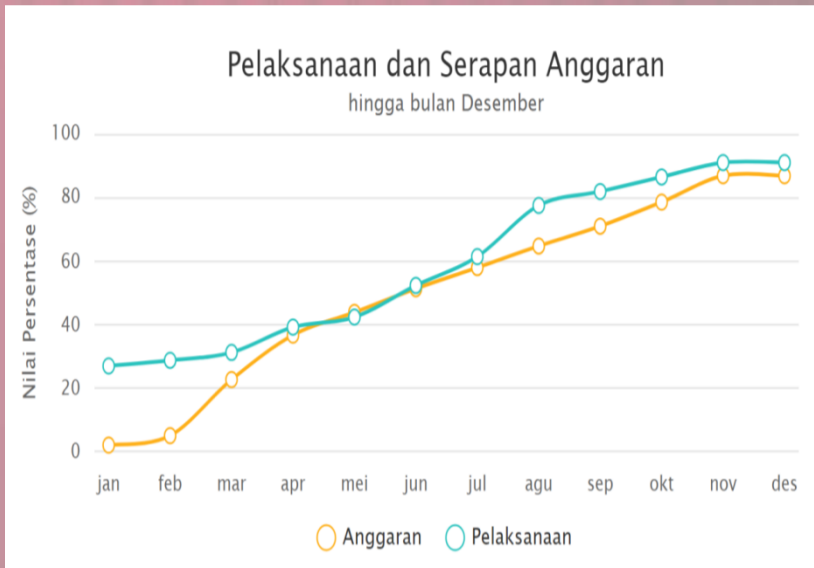


Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

F. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. REALISASI ANGGARAN

Pada prinsipnya KPU Kabupaten Pandeglang ingin menyajikan laporan keuangan yang baik secara penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Hal ini tentu diperlukan SDM yang mumpuni dalam pengelolaannya, KPU Kabupaten Pandeglang mengadopsi Aplikasi SAKTI untuk mencapai sasaran tersebut dimana Sistem Aplikasi



Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan

perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Nilai akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dianggap masih standar secara penilaian mendapatkan hasil dengan predikat B, berbeda dengan penilaian Badan Pengawasan Keuangan yang memberikan *predikat WTP kepada KPU Kabupaten Pandeglang*. Hal ini tentunya tetap menjadi bahan evaluasi sebagaimana pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangaunan Zona Integritas. Guna menekankan Sistem pelaporan akuntabilitas keuangan melaksanakan PP Nomor 39 Tahun



2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dalam hal ini yaitu Aplikasi E-Monev Bappenas. Dalam sebuah capaian demi terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran yang efisien dan efektif, KPU Kabupaten Pandeglang mematangkan



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

secara dini dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana belanja, Program serta rencana pembiayaan yang menjadi dasar kendati terjadi beberapa Revisi anggaran sehingga dalam penggunaan anggaran sesuai dengan sebaran laporan ketersediaan anggaran tahun 2023 sebagaimana pelaksanaannya realisasi dibawah ini :

**Gambar : Sumber Data Aplikasi Sakti Periode Akhir Tahun 2023
KPU Kabupaten Pandeglang**

Lembar 1

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 1 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023			SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode		
JUMLAH SELURUHNYA	63.313.960.000	0	52.018.304.461	10.267.627.074	62.285.931.535	98,38 %	1.028.028.466
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	61.055.101.000	0	49.842.269.432	10.194.410.625	60.036.680.057	98,33 %	1.018.420.943
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.684.739.000	0	890.367.800	606.641.500	1.497.009.300	88,86 %	187.729.700
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.678.261.000	0	887.228.800	606.641.500	1.493.870.300	89,01 %	184.390.700
QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.061.690.000	0	721.698.500	208.739.900	930.438.400	87,64 %	131.251.600
111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	256.348.000	0	250.296.500	5.731.000	256.027.500	99,87 %	320.500
111.0A Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	223.508.000	0	217.456.500	5.731.000	223.187.500	99,86 %	320.500
521211 Belanja Bahan	24.174.000	0	20.495.000	3.679.000	24.174.000	100,00 %	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	43.500.000	0	43.500.000	0	43.500.000	100,00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	100,00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.019.000	0	82.646.500	2.052.000	84.698.500	99,62 %	320.500
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	69.015.000	0	69.015.000	0	69.015.000	100,00 %	0
111.0B Dukungan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	32.840.000	0	32.840.000	0	32.840.000	100,00 %	0
521211 Belanja Bahan	10.490.000	0	10.490.000	0	10.490.000	100,00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.900.000	0	4.900.000	0	4.900.000	100,00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.450.000	0	17.450.000	0	17.450.000	100,00 %	0
113 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	805.342.000	0	471.402.000	203.008.900	674.410.900	83,74 %	130.931.100
113.0A Dukungan Operasional Perkantoran	432.182.000	0	319.862.600	69.082.400	388.945.000	90,00 %	43.237.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	25.000.000	0	5.687.000	16.877.300	22.564.300	90,26 %	2.435.700
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	200.000	0	63.000	0	63.000	31,50 %	137.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	171.140.000	0	141.100.000	30.040.000	171.140.000	100,00 %	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	29.400.000	0	29.299.000	0	29.299.000	99,66 %	101.000
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	410.000	0	410.000	0	410.000	100,00 %	0
522111 Belanja Langganan Listrik	36.307.000	0	24.346.900	10.407.200	34.754.100	95,72 %	1.552.900
522112 Belanja Langganan Telepon	1.000.000	0	505.500	45.500	551.000	55,10 %	449.000
522113 Belanja Langganan Air	100.000	0	0	0	0	0,00 %	100.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Lembar 2

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 1 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023			SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode		
JUMLAH SELURUHNYA	63.313.960.000	0	52.018.304.461	10.267.627.074	62.285.931.535	98,38 %	1.028.028.466
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	61.055.101.000	0	49.842.269.432	10.194.410.625	60.036.680.057	98,33 %	1.018.420.943
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.684.739.000	0	890.367.800	606.641.500	1.497.009.300	88,86 %	187.729.700
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.678.261.000	0	887.228.800	606.641.500	1.493.870.300	89,01 %	184.390.700
QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.061.690.000	0	721.698.500	208.739.900	930.438.400	87,64 %	131.251.600
111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	256.348.000	0	250.296.500	5.731.000	256.027.500	99,87 %	320.500
111.0A Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	223.508.000	0	217.456.500	5.731.000	223.187.500	99,86 %	320.500
521211 Belanja Bahan	24.174.000	0	20.495.000	3.679.000	24.174.000	100,00 %	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	43.500.000	0	43.500.000	0	43.500.000	100,00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	100,00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.019.000	0	82.646.500	2.052.000	84.698.500	99,62 %	320.500
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	69.015.000	0	69.015.000	0	69.015.000	100,00 %	0
111.0B Dukungan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	32.840.000	0	32.840.000	0	32.840.000	100,00 %	0
521211 Belanja Bahan	10.490.000	0	10.490.000	0	10.490.000	100,00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.900.000	0	4.900.000	0	4.900.000	100,00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.450.000	0	17.450.000	0	17.450.000	100,00 %	0
113 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	805.342.000	0	471.402.000	203.008.900	674.410.900	83,74 %	130.931.100
113.0A Dukungan Operasional Perkantoran	432.182.000	0	319.862.600	69.082.400	388.945.000	90,00 %	43.237.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	25.000.000	0	5.687.000	16.877.300	22.564.300	90,26 %	2.435.700
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	200.000	0	63.000	0	63.000	31,50 %	137.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	171.140.000	0	141.100.000	30.040.000	171.140.000	100,00 %	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	29.400.000	0	29.299.000	0	29.299.000	99,66 %	101.000
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	410.000	0	410.000	0	410.000	100,00 %	0
522111 Belanja Langganan Listrik	36.307.000	0	24.346.900	10.407.200	34.754.100	95,72 %	1.552.900
522112 Belanja Langganan Telepon	1.000.000	0	505.500	45.500	551.000	55,10 %	449.000
522113 Belanja Langganan Air	100.000	0	0	0	0	0,00 %	100.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Lembar 3

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 3 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
111 Pelaksanaan Sosialisasi/Perjuhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	604,123,000	0	156,203,000	307,751,600	553,954,800	91.70 %	50,168,400
111.0A Sosialisasi Tatap Muka	101,730,000	0	93,572,800	1,500,000	95,072,800	93.46 %	6,657,200
521211 Belanja Bahan	58,370,000	0	53,062,800	1,500,000	54,562,800	93.48 %	3,807,200
522141 Belanja Sewa	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	1,800,000	0	1,800,000	50.00 %	1,800,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,660,000	0	6,610,000	0	6,610,000	99.25 %	50,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,100,000	0	32,100,000	0	32,100,000	100.00 %	0
111.0B Penyusunan Laporan	669,000	0	647,000	0	647,000	96.71 %	22,000
521211 Belanja Bahan	669,000	0	647,000	0	647,000	96.71 %	22,000
111.0C Biaya Dukungan Pelaksanaan Kirab di Kab/Kota:	50,000,000	0	49,983,200	0	49,983,200	99.97 %	16,800
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	50,000,000	0	49,983,200	0	49,983,200	99.97 %	16,800
111.TJ Tambahan Revisi 7	39,344,000	0	0	29,539,000	29,539,000	75.08 %	9,805,000
521211 Belanja Bahan	19,344,000	0	0	11,923,000	11,923,000	61.64 %	7,421,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	0	0	17,616,000	17,616,000	88.08 %	2,384,000
111.TK ALAT PERAGA SOSIALISASI	147,050,000	0	0	145,587,600	145,587,600	99.01 %	1,462,400
521211 Belanja Bahan	147,050,000	0	0	145,587,600	145,587,600	99.01 %	1,462,400
111.TL SOSIALISASI GERELEG LEMBUR	67,100,000	0	0	65,400,000	65,400,000	97.47 %	1,700,000
521211 Belanja Bahan	43,100,000	0	0	42,800,000	42,800,000	99.30 %	300,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,000,000	0	0	22,600,000	22,600,000	94.17 %	1,400,000
111.TM PODCAST	5,100,000	0	0	2,800,000	2,800,000	54.90 %	2,300,000
521211 Belanja Bahan	900,000	0	0	0	0	0.00 %	900,000
522151 Belanja Jasa Profesi	4,200,000	0	0	2,800,000	2,800,000	66.67 %	1,400,000
111.TN PELATIHAN JURNALISTIK PPK DAN KPU	56,175,000	0	0	55,175,000	55,175,000	98.22 %	1,000,000
521211 Belanja Bahan	1,150,000	0	0	150,000	150,000	13.04 %	1,000,000
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	100.00 %	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	51,425,000	0	0	51,425,000	51,425,000	100.00 %	0
111.TO SOSIALISASI PARTISIPASI RENDAH, RAWAN BENCANA DAN	104,800,000	0	0	79,250,000	79,250,000	75.62 %	25,550,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Lembar 4

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 4 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
111.TO PENYANDANG DISABILITAS KEPADA TOKMAS	104,800,000	0	0	79,250,000	79,250,000	75.62 %	25,550,000
521211 Belanja Bahan	66,600,000	0	0	50,300,000	50,300,000	75.53 %	16,300,000
522141 Belanja Sewa	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
522151 Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28,000,000	0	0	21,750,000	21,750,000	77.68 %	6,250,000
111.7P BIMTEK SIKADEKA	32,155,000	0	12,000,000	18,500,000	30,500,000	94.85 %	1,655,000
521211 Belanja Bahan	1,300,000	0	250,000	0	250,000	19.23 %	1,050,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,855,000	0	11,750,000	18,500,000	30,250,000	98.04 %	605,000
QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	8,007,000	0	6,936,000	150,000	7,086,000	88.50 %	921,000
112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	8,007,000	0	6,936,000	150,000	7,086,000	88.50 %	921,000
112.0A SOSIALISASI KEBIJAKAN/REGULASI KPU	6,007,000	0	4,936,000	150,000	5,086,000	84.67 %	921,000
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	996,000	0	996,000	99.60 %	4,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,407,000	0	3,340,000	150,000	3,490,000	79.19 %	917,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00 %	0
112.0B PENGELOLAAN DJIH	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00 %	0
RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,478,000	0	3,139,000	0	3,139,000	48.46 %	3,339,000
RAN.001 Sarana IT Pemilu	6,478,000	0	3,139,000	0	3,139,000	48.46 %	3,339,000
110 Pengelolaan Sarana IT KPU	6,478,000	0	3,139,000	0	3,139,000	48.46 %	3,339,000
110.0A Pengelolaan Sarana IT KPU	6,478,000	0	3,139,000	0	3,139,000	48.46 %	3,339,000
521211 Belanja Bahan	6,478,000	0	3,139,000	0	3,139,000	48.46 %	3,339,000
CQ.6710 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	193,307,000	0	191,887,000	0	191,887,000	99.27 %	1,420,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	193,307,000	0	191,887,000	0	191,887,000	99.27 %	1,420,000
QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	193,307,000	0	191,887,000	0	191,887,000	99.27 %	1,420,000
051 Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	193,307,000	0	191,887,000	0	191,887,000	99.27 %	1,420,000
051.0A EVALUASI VERPOL	6,147,000	0	5,635,000	0	5,635,000	91.67 %	512,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Lembar 5

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 5 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	2,115,000	0	2,115,000	0	2,115,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,032,000	0	3,520,000	0	3,520,000	87.30	512,000
051.0B PEMUTAKHIRAN DATA PARPOL	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
051.0F Dukungan Verifikasi Faktual Pencalonan DPD	123,310,000	0	122,502,000	0	122,502,000	99.34	808,000
521211 Belanja Bahan	22,160,000	0	22,152,000	0	22,152,000	99.96	8,000
522141 Belanja Sewa	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58,550,000	0	58,550,000	0	58,550,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32,160,000	0	31,360,000	0	31,360,000	97.51	800,000
051.0G Dukungan Kegiatan Pemutakhiran data Pemilih Pemilu	58,450,000	0	58,350,000	0	58,350,000	99.83	100,000
521211 Belanja Bahan	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,500,000	0	2,400,000	0	2,400,000	96.00	100,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	55,750,000	0	55,750,000	0	55,750,000	100.00	0
CD.6867 Pembentukan Badan Adhoc	54,616,162,000	0	45,671,199,500	8,687,996,925	54,359,196,425	99.53	256,965,575
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	54,616,162,000	0	45,671,199,500	8,687,996,925	54,359,196,425	99.53	256,965,575
QGE.001 Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	2,006,058,000	0	1,749,986,000	237,921,000	1,987,907,000	99.10	18,151,000
051 Fasilitas Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	2,006,058,000	0	1,749,986,000	237,921,000	1,987,907,000	99.10	18,151,000
051.0A Pelantikan dan Bimtek Badan Adhoc (PPK)	527,866,000	0	527,866,000	0	527,866,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	303,866,000	0	303,866,000	0	303,866,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	203,500,000	0	203,500,000	0	203,500,000	100.00	0
051.0B Penetapan dan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Badan Adhoc (Sekretariat PPK)	115,004,000	0	115,004,000	0	115,004,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	3,659,000	0	3,659,000	0	3,659,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Lembar 6

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 6 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	108,385,000	0	108,385,000	0	108,385,000	100.00	0
051.0C Seleksi Tertulis/CAT (PPS)	73,255,000	0	73,255,000	0	73,255,000	100.00	0
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	510,000	0	510,000	0	510,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	28,045,000	0	28,045,000	0	28,045,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44,700,000	0	44,700,000	0	44,700,000	100.00	0
051.0D Seleksi Wawancara Badan Adhoc (PPS)	93,390,000	0	93,390,000	0	93,390,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	32,340,000	0	32,340,000	0	32,340,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53,550,000	0	53,550,000	0	53,550,000	100.00	0
051.0E Pelantikan Badan Adhoc (PPS)	512,431,000	0	512,431,000	0	512,431,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	84,191,000	0	84,191,000	0	84,191,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	198,500,000	0	198,500,000	0	198,500,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,940,000	0	14,940,000	0	14,940,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	214,800,000	0	214,800,000	0	214,800,000	100.00	0
051.0F Bimtek PPS dan Sekretariat PPS Pemilu 2024	418,440,000	0	418,440,000	0	418,440,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	87,990,000	0	87,990,000	0	87,990,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	295,450,000	0	295,450,000	0	295,450,000	100.00	0
051.0G Dukungan Operasional Tahapan Lainnya	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	100.00	0
051.TJ Tambahan Seleksi_KPPS	109,917,000	0	0	91,766,000	91,766,000	83.49	18,151,000
521211 Belanja Bahan	25,467,000	0	0	17,606,000	17,606,000	69.13	7,861,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,000,000	0	0	19,710,000	19,710,000	65.70	10,290,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	54,450,000	0	0	54,450,000	54,450,000	100.00	0
051.TK Dukungan tahapan	146,155,000	0	0	146,155,000	146,155,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	95,305,000	0	0	95,305,000	95,305,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



Laporan Kinerja

KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Lembar 7

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 7 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	50,850,000	0	0	50,850,000	50,850,000	100.00	0
QGE.002 Honorarium Badan Adhoc	42,436,846,000	0	36,167,500,000	6,267,800,000	42,435,300,000	100.00	1,546,000
051 Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	42,436,846,000	0	36,167,500,000	6,267,800,000	42,435,300,000	100.00	1,546,000
051.0A Honorarium Badan Adhoc	23,815,750,000	0	23,633,750,000	182,000,000	23,815,750,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	23,815,750,000	0	23,633,750,000	182,000,000	23,815,750,000	100.00	0
051.TB Tambahan SABA BUN Honor Adhoc	17,711,400,000	0	12,533,750,000	5,176,104,000	17,709,854,000	99.99 %	1,546,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	17,711,400,000	0	12,533,750,000	5,176,104,000	17,709,854,000	99.99 %	1,546,000
051.TC Tambahan Honor	909,696,000	0	0	909,696,000	909,696,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	909,696,000	0	0	909,696,000	909,696,000	100.00	0
QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	10,173,258,000	0	7,753,713,500	2,182,275,925	9,935,989,425	97.67 %	237,268,575
051 Dukungan Operasional Badan Adhoc	10,173,258,000	0	7,753,713,500	2,182,275,925	9,935,989,425	97.67 %	237,268,575
051.0A Dukungan Operasional Badan Adhoc	5,048,744,000	0	5,048,743,500	0	5,048,743,500	100.00	500
521211 Belanja Bahan	174,100,000	0	174,100,000	0	174,100,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,874,644,000	0	4,874,643,500	0	4,874,643,500	100.00	500
051.0B Dukungan Operasional Partialis	1,001,724,000	0	1,001,720,000	0	1,001,720,000	100.00	4,000
521211 Belanja Bahan	1,001,724,000	0	1,001,720,000	0	1,001,720,000	100.00	4,000
051.0C Santunan Kecelakaan Kerja Badan Ad hoc	102,250,000	0	102,250,000	0	102,250,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	102,250,000	0	102,250,000	0	102,250,000	100.00	0
051.TC Tambahan Operasional	2,454,000,000	0	1,601,000,000	853,000,000	2,454,000,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	901,100,000	0	594,900,000	306,200,000	901,100,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,552,900,000	0	1,006,100,000	546,800,000	1,552,900,000	100.00	0
051.TD Tambahan Anggaran Bimtek PPK dan PPS	1,038,160,000	0	0	830,268,725	830,268,725	79.98 %	207,891,275
521211 Belanja Bahan	211,985,000	0	0	133,108,725	133,108,725	62.79 %	78,876,275
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	826,175,000	0	0	697,160,000	697,160,000	84.38 %	129,015,000
051.TE BIMTEK PERTANGGUNGJAWABAN BADAN ADHOC	102,880,000	0	0	87,700,000	87,700,000	85.24 %	15,180,000
521211 Belanja Bahan	31,240,000	0	0	30,225,000	30,225,000	96.75 %	1,015,000
522151 Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	0	0	0	0.00 %	5,400,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Lembar 8

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 8 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66,240,000	0	0	57,475,000	57,475,000	86.77 %	8,765,000
051.TF Pembentukan KPPS	329,050,000	0	0	329,050,000	329,050,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	288,150,000	0	0	288,150,000	288,150,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	40,900,000	0	0	40,900,000	40,900,000	100.00	0
051.TG Dukungan Tahapan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dan, Simulasi Sirekap	96,450,000	0	0	82,257,200	82,257,200	85.28 %	14,192,800
521211 Belanja Bahan	48,000,000	0	0	39,857,200	39,857,200	83.04 %	8,142,800
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	24,100,000	0	0	21,600,000	21,600,000	89.63 %	2,500,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,850,000	0	0	16,300,000	16,300,000	82.12 %	3,550,000
CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	56,890,000	0	18,014,900	6,860,000	24,874,900	43.72 %	32,015,100
QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu	19,959,000	0	17,644,900	0	17,644,900	88.41 %	2,314,100
051 Persiapan Kampanye Pemilu	19,959,000	0	17,644,900	0	17,644,900	88.41 %	2,314,100
051.0A Persiapan Kampanye Pemilu	19,959,000	0	17,644,900	0	17,644,900	88.41 %	2,314,100
521211 Belanja Bahan	3,527,000	0	1,575,000	0	1,575,000	44.66 %	1,952,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,432,000	0	16,069,900	0	16,069,900	97.80 %	362,100
QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	35,836,000	0	370,000	6,860,000	7,230,000	20.18 %	28,606,000
051 Pengelolaan Kampanye Pemilu	35,836,000	0	370,000	6,860,000	7,230,000	20.18 %	28,606,000
051.0A Pengelolaan Kampanye Pemilu	35,836,000	0	370,000	6,860,000	7,230,000	20.18 %	28,606,000
521211 Belanja Bahan	25,836,000	0	0	6,860,000	6,860,000	26.55 %	18,976,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,000,000	0	370,000	0	370,000	3.70 %	9,630,000
QGE.003 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1,095,000	0	0	0	0	0.00 %	1,095,000
051 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1,095,000	0	0	0	0	0.00 %	1,095,000
051.0A Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1,095,000	0	0	0	0	0.00 %	1,095,000
521211 Belanja Bahan	1,095,000	0	0	0	0	0.00 %	1,095,000
CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	3,988,997,000	0	2,596,197,732	889,082,200	3,485,279,932	87.37 %	503,717,068

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



Laporan Kinerja

KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Lembar 9

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 9 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	3,988,997,000	0	2,596,197,732	889,082,200	3,485,279,932	87.37 %	503,717,068
QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1,412,625,000	0	989,962,500	233,887,200	1,223,849,700	86.64 %	188,775,300
051 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1,412,625,000	0	989,962,500	233,887,200	1,223,849,700	86.64 %	188,775,300
051.0A Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	165,313,000	0	14,187,000	136,711,000	150,898,000	91.28 %	14,415,000
521211 Belanja Bahan	23,325,000	0	3,837,000	8,451,000	12,288,000	52.68 %	11,037,000
522151 Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	0	3,600,000	3,600,000	66.67 %	1,800,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,488,000	0	10,350,000	0	10,350,000	98.68 %	138,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	126,100,000	0	0	124,660,000	124,660,000	98.86 %	1,440,000
051.TL Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1,247,312,000	0	975,775,500	97,176,200	1,072,951,700	86.02 %	174,360,300
521211 Belanja Bahan	56,005,000	0	16,785,000	8,320,000	25,105,000	44.83 %	30,900,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	105,100,000	0	6,620,000	20,586,700	27,206,700	25.89 %	77,893,300
522141 Belanja Sewa	910,000,000	0	910,000,000	0	910,000,000	100.00 %	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	53,450,000	0	12,500,000	40,950,000	53,450,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	105,995,000	0	15,620,500	27,319,500	42,940,000	40.51 %	63,055,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,762,000	0	14,250,000	0	14,250,000	85.01 %	2,512,000
QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2,480,271,000	0	1,605,735,232	655,195,000	2,260,930,232	91.16 %	219,340,768
051 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2,480,271,000	0	1,605,735,232	655,195,000	2,260,930,232	91.16 %	219,340,768
051.0A Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia	1,057,271,000	0	183,619,300	655,195,000	838,814,300	79.34 %	218,456,700
521211 Belanja Bahan	3,366,000	0	3,327,000	0	3,327,000	98.84 %	39,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	42,300,000	0	21,150,000	21,150,000	42,300,000	100.00 %	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	232,717,000	0	34,316,400	0	34,316,400	14.75 %	198,400,600
522191 Belanja Jasa Lainnya	95,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,488,000	0	29,825,900	400,000	30,225,900	99.14 %	262,100
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	653,400,000	0	0	633,645,000	633,645,000	96.98 %	19,755,000
051.0B Dukungan Sosialisasi	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00 %	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00 %	0
051.TL Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,403,000,000	0	1,402,115,932	0	1,402,115,932	99.94 %	884,068

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Lembar 10

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 10 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,403,000,000	0	1,402,115,932	0	1,402,115,932	99.94 %	884,068
QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	96,101,000	0	500,000	0	500,000	0.52 %	95,601,000
051 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	96,101,000	0	500,000	0	500,000	0.52 %	95,601,000
051.0A Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1,000,000	0	500,000	0	500,000	50.00 %	500,000
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	500,000	0	500,000	50.00 %	500,000
051.TL Pengelolaan Dokumentasi Logistik	95,101,000	0	0	0	0	0.00 %	95,101,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	95,101,000	0	0	0	0	0.00 %	95,101,000
CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	42,451,000	0	40,954,000	0	40,954,000	96.47 %	1,497,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	42,451,000	0	40,954,000	0	40,954,000	96.47 %	1,497,000
QGE.001 Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	42,165,000	0	40,954,000	0	40,954,000	97.13 %	1,211,000
051 Fasilitas penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	42,165,000	0	40,954,000	0	40,954,000	97.13 %	1,211,000
051.0A Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	42,165,000	0	40,954,000	0	40,954,000	97.13 %	1,211,000
521211 Belanja Bahan	3,963,000	0	2,752,700	0	2,752,700	69.46 %	1,210,300
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,747,000	0	9,746,300	0	9,746,300	99.99 %	700
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24,855,000	0	24,855,000	0	24,855,000	100.00 %	0
QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	191,000	0	0	0	0	0.00 %	191,000
051 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	191,000	0	0	0	0	0.00 %	191,000
051.0A Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	191,000	0	0	0	0	0.00 %	191,000
521211 Belanja Bahan	191,000	0	0	0	0	0.00 %	191,000
QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	95,000	0	0	0	0	0.00 %	95,000
051 Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	95,000	0	0	0	0	0.00 %	95,000
051.0A Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	95,000	0	0	0	0	0.00 %	95,000
521211 Belanja Bahan	95,000	0	0	0	0	0.00 %	95,000
CQ.6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	169,673,000	0	166,213,800	600,000	166,813,800	98.31 %	2,859,200
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	169,673,000	0	166,213,800	600,000	166,813,800	98.31 %	2,859,200

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



Laporan Kinerja

KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Lembar 11

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 11 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	20,809,000	0	20,507,500	150,000	20,657,500	99.27 %	151,500
051 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	20,809,000	0	20,507,500	150,000	20,657,500	99.27 %	151,500
051.0A Bimtek, Rapat Koordinasi, Rapat Pleno Terbuka	20,809,000	0	20,507,500	150,000	20,657,500	99.27 %	151,500
521211 Belanja Bahan	5,278,000	0	5,277,000	0	5,277,000	99.98 %	1,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,531,000	0	12,530,500	0	12,530,500	100.00 %	500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	0	2,700,000	150,000	2,850,000	95.00 %	150,000
QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih	138,070,000	0	135,051,300	450,000	135,501,300	98.14 %	2,568,700
051 Pemutakhiran Data Pemilih	138,070,000	0	135,051,300	450,000	135,501,300	98.14 %	2,568,700
051.0A Pemutakhiran Data Pemilih	7,850,000	0	7,850,000	0	7,850,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00 %	0
051.TA Dukungan Pelaksanaan Penetapan DPT	128,000,000	0	124,981,300	450,000	125,431,300	97.99 %	2,568,700
521211 Belanja Bahan	45,276,000	0	43,746,500	0	43,746,500	96.62 %	1,529,500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
522141 Belanja Sewa	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,199,000	0	32,084,800	450,000	32,534,800	98.00 %	664,200
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45,024,000	0	44,650,000	0	44,650,000	99.17 %	374,000
051.TB Dukungan Kegiatan Rakor DPSHP	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000	100.00 %	0
QGE.003 Penetapan Data Pemilih	10,794,000	0	10,655,000	0	10,655,000	98.71 %	139,000
051 Penetapan Data Pemilih	10,794,000	0	10,655,000	0	10,655,000	98.71 %	139,000
051.0A Penetapan Data Pemilih	10,794,000	0	10,655,000	0	10,655,000	98.71 %	139,000
521211 Belanja Bahan	10,794,000	0	10,655,000	0	10,655,000	98.71 %	139,000
CQ.6888 Penetapan Peserta Pemilu	8,240,000	0	0	3,230,000	3,230,000	39.20 %	5,010,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	8,240,000	0	0	3,230,000	3,230,000	39.20 %	5,010,000
QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	8,240,000	0	0	3,230,000	3,230,000	39.20 %	5,010,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Lembar 12

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 12 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	8,240,000	0	0	3,230,000	3,230,000	39.20 %	5,010,000
051.TJ Tambahan Revisi 7	8,240,000	0	0	3,230,000	3,230,000	39.20 %	5,010,000
521211 Belanja Bahan	8,240,000	0	0	3,230,000	3,230,000	39.20 %	5,010,000
CQ.6888 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	32,208,000	0	31,587,500	0	31,587,500	98.07 %	620,500
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	32,208,000	0	31,587,500	0	31,587,500	98.07 %	620,500
QGE.001 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	9,725,000	0	9,419,500	0	9,419,500	96.86 %	305,500
051 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	9,725,000	0	9,419,500	0	9,419,500	96.86 %	305,500
051.0A PENETAPAN DAN SOSIALISASI DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI	9,725,000	0	9,419,500	0	9,419,500	96.86 %	305,500
521211 Belanja Bahan	4,835,000	0	4,529,500	0	4,529,500	93.68 %	305,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,890,000	0	4,890,000	0	4,890,000	100.00 %	0
QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	12,875,000	0	12,763,000	0	12,763,000	99.13 %	112,000
051 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	12,875,000	0	12,763,000	0	12,763,000	99.13 %	112,000
051.0A Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	12,875,000	0	12,763,000	0	12,763,000	99.13 %	112,000
521211 Belanja Bahan	7,975,000	0	7,863,000	0	7,863,000	98.60 %	112,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,900,000	0	4,900,000	0	4,900,000	100.00 %	0
QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	9,608,000	0	9,405,000	0	9,405,000	97.89 %	203,000
051 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	9,608,000	0	9,405,000	0	9,405,000	97.89 %	203,000
051.0A Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	9,608,000	0	9,405,000	0	9,405,000	97.89 %	203,000
521211 Belanja Bahan	2,128,000	0	1,925,000	0	1,925,000	90.46 %	203,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,480,000	0	7,480,000	0	7,480,000	100.00 %	0
CQ.6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	262,434,000	0	235,847,200	0	235,847,200	89.87 %	26,586,800
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	262,434,000	0	235,847,200	0	235,847,200	89.87 %	26,586,800
QGE.001 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	94,775,000	0	93,664,000	0	93,664,000	98.83 %	1,111,000
051 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	94,775,000	0	93,664,000	0	93,664,000	98.83 %	1,111,000
051.0A PENCALONAN ANGGOTA DPD	94,775,000	0	93,664,000	0	93,664,000	98.83 %	1,111,000
521211 Belanja Bahan	21,510,000	0	20,399,000	0	20,399,000	94.83 %	1,111,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Lembar 13

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 13 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	30,950,000	0	30,950,000	0	30,950,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,865,000	0	4,865,000	0	4,865,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,450,000	0	37,450,000	0	37,450,000	100.00	0
QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan	149,539,000	0	127,523,200	0	127,523,200	85.28 %	22,015,800
051 Pelaksanaan Proses Pencalonan	149,539,000	0	127,523,200	0	127,523,200	85.28 %	22,015,800
051.0A Persiapan Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota	18,372,000	0	18,002,500	0	18,002,500	97.99 %	369,500
521211 Belanja Bahan	9,267,000	0	8,897,500	0	8,897,500	96.01 %	369,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,105,000	0	9,105,000	0	9,105,000	100.00	0
051.0B PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	116,167,000	0	109,520,700	0	109,520,700	94.28 %	6,646,300
521211 Belanja Bahan	25,295,000	0	18,849,000	0	18,849,000	73.73 %	6,646,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	52,500,000	0	52,500,000	0	52,500,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,672,000	0	26,671,700	0	26,671,700	100.00	300
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,700,000	0	11,700,000	0	11,700,000	100.00	0
051.TJ Tambahan APK_BK	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
QGE.003 Evaluasi Pencalonan	18,120,000	0	14,660,000	0	14,660,000	80.91 %	3,460,000
051 Evaluasi Pencalonan	18,120,000	0	14,660,000	0	14,660,000	80.91 %	3,460,000
051.0A Evaluasi Pencalonan	18,120,000	0	14,660,000	0	14,660,000	80.91 %	3,460,000
521211 Belanja Bahan	2,000,000	0	1,945,000	0	1,945,000	97.25 %	55,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,120,000	0	12,715,000	0	12,715,000	78.88 %	3,405,000
WA.Program Dukungan Manajemen	2,258,859,000	0	2,176,035,029	73,216,449	2,249,251,478	99.57 %	9,607,522
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,210,699,000	0	2,127,875,429	73,216,449	2,201,091,878	99.57 %	9,607,122
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,180,406,000	0	2,098,782,929	72,016,449	2,170,799,378	99.56 %	9,606,622
EBA.994 Layanan Perkantoran	2,180,406,000	0	2,098,782,929	72,016,449	2,170,799,378	99.56 %	9,606,622
001 Gaji dan Tunjangan	2,180,406,000	0	2,098,782,929	72,016,449	2,170,799,378	99.56 %	9,606,622
001.0A Gaji dan Tunjangan	1,402,775,000	0	1,321,152,529	72,016,449	1,393,168,978	99.32 %	9,606,022
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	539,628,000	0	524,104,800	14,920,300	539,025,100	99.89 %	602,900

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Lembar 14

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 14 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,000	0	6,672	187	6,859	68.59 %	3,141
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	45,253,000	0	44,150,760	1,101,880	45,252,640	100.00	360
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	15,380,000	0	15,018,392	361,100	15,379,492	100.00	508
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0	45,000,000	2,880,000	47,880,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	453,000	0	438,600	14,341	452,941	99.99 %	59
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	39,397,000	0	38,527,440	869,040	39,396,480	100.00	520
511129 Belanja Uang Makan PNS	71,267,000	0	57,214,000	6,985,000	64,199,000	90.08 %	7,068,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	17,710,000	0	17,710,000	0	17,710,000	100.00	0
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	625,796,000	0	578,981,865	44,884,601	623,866,466	99.69 %	1,929,534
001.0B Uang Kehormatan	777,631,000	0	777,630,400	0	777,630,400	100.00	600
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	777,631,000	0	777,630,400	0	777,630,400	100.00	600
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,293,000	0	29,092,500	1,200,000	30,292,500	100.00	500
EBD.956 Layanan Manajemen Keuangan	30,293,000	0	29,092,500	1,200,000	30,292,500	100.00	500
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	30,293,000	0	29,092,500	1,200,000	30,292,500	100.00	500
005.0A Penyusunan Laporan Keuangan Tahapan Pemilihan dan Tahapan Pemilu Tahun 2024	11,922,000	0	11,921,500	0	11,921,500	100.00	500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,322,000	0	8,321,500	0	8,321,500	99.99 %	500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
005.0B PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	18,371,000	0	17,171,000	1,200,000	18,371,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	7,200,000	0	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	5,340,000	0	5,340,000	0	5,340,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,831,000	0	5,831,000	0	5,831,000	100.00	0
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	41,360,000	0	41,359,600	0	41,359,600	100.00	400
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	41,360,000	0	41,359,600	0	41,359,600	100.00	400
EBA.994 Layanan Perkantoran	41,360,000	0	41,359,600	0	41,359,600	100.00	400
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	41,360,000	0	41,359,600	0	41,359,600	100.00	400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Lembar 15

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 15 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0A Layanan Perkantoran	41.360.000	0	41.359.600	0	41.359.600	100.00	400
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	40.620.000	0	40.619.600	0	40.619.600	100.00	400
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	740.000	0	740.000	0	740.000	100.00	0
WA.6634 Data dan Informasi	6.800.000	0	6.800.000	0	6.800.000	100.00	0
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.800.000	0	6.800.000	0	6.800.000	100.00	0
EBA.963 Layanan Data dan Informasi	6.800.000	0	6.800.000	0	6.800.000	100.00	0
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	6.800.000	0	6.800.000	0	6.800.000	100.00	0
005.0A Layanan Data dan Informasi	6.800.000	0	6.800.000	0	6.800.000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	3.300.000	0	3.300.000	0	3.300.000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	100.00	0

2. EVALUASI DAN TINDAKLANJUT

KPU Kabupaten dengan segala keterbatasan SDM yang terbatas mengakui kelemahan dalam segi Pelaporan, namun dengan cepat secara terkordinir KPU Kabupaten Pandeglang dapat menyelesaikan hasil temuan-temuan yang dianggap Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi dan Inspektorat kurang secara dokumen. Sebagai bahan perbaikan kedepannya, KPU Kabupaten Pandeglang.

Gambar : Matrix Progress Tindaklanjuti Inspektorat Utama

Matriks Progress Tindak Lanjut Atas LHP yang Diterbitkan Inspektorat Utama
Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020

Lampiran I-I

I Matriks Progress Tindak Lanjut

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindaklanjuti		SISA SALDO
	Uraian	Jml	Nominal	Uraian	Jml	Nominal	Uraian	Nominal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NIHIL								
2	NIHIL								
3	NIHIL								
JUMLAH		0	-	0		-	-		-



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Gambar : Matrix Progress Tindakanlanjut BPK RI

**MATRIKS PROGRES TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI
HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**

MATRIK PROGRES TINDAK LANJUT

No.	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindakan Lanjut			SISA SALDO
	Uraian	Jml	Nominal	Uraian	Jml	Nominal	Uraian	Jml	Nominal	
1	Temuan pembayaran honorarium Tim Kelompok Kerja tidak sesuai ketentuan pada KPU Provinsi Banten senilai Rp. 109.817.500,- dan KPU Kabupaten Pandeglang senilai Rp. 14.397.500,-	14.397.500,-	Empat belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah	Ketua KPU Kabupaten Pandeglang agar memerintahkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang untuk mendokumentasikan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi atas kegiatan perencanaan	14.397.500,-	Empat belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah	Surat Perintah Ketua KPU Pandeglang Nomor : 141/KU.06.2-Spt/3601/2022	14.397.500,-	Empat belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah	0
2	Temuan monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pelaksanaan distribusi logistik pemilu tidak dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan									
3	Temuan laporan monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pelaksanaan distribusi logistik pemilu tidak disampaikan kepada pihak terkait			Sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pendistribusian logistik pemilu; Sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang untuk memerintahkan Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik terkait agar meningkatkan pengendalian pendistribusian logistik Siemua Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun SOP atau pola koordinasi antar kelompok penyelenggara pemilu dalam pendistribusian logistik surat suara.			Surat Pernyataan Sekretaris KPU Pandeglang Nomor 34/KU.06.2/3601/2022 Surat Perintah Sekretaris KPU Pandeglang Nomor : 33/KU.06.2-Spt/3601/2022			
JUMLAH		14.397.500,-	-		14.397.500,-	-		0	-	0

Gambar : Matrix Progress Tindakanlanjut Inspektorat Utama

**MATRIKS PROGRES TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN INSPEKTORAT UTAMA
HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DANA HIBAH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2020**

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindakan Lanjut			Sisa Saldo
	Uraian	Jml	Nominal	Uraian	Jml	Nominal	Uraian	Jml	Nominal	
1	Realisasi belanja barang tidak didukung bukti pertanggungjawaban	225.638.505.00	Dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja bawahannya 2. memerintahkan masing-masing pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang yang bertanggungjawab atas kegiatan dimaksud untuk segera menyampaikan atau melaporkan bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya sesuai ketentuan yang berlaku						
2	Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap	292.395.000.00	Dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah	517.993.505.00	Lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah	Surat Teguran BPP dan Bantia Acara verifikasi pertanggungjawaban Pejabat Bupati barang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan bukti pertanggungjawaban tidak lengkap (bukti pertanggungjawaban PDF)	517.993.505.00	Lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah	0	
3	Pembayaran biaya perjalanan dinas pada KPU Kab. Pandeglang tidak didukung pertanggungjawaban yang lengkap	55.083.600.00	Lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah	55.083.600.00	Lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah	bukti pertanggungjawaban PDF	55.083.600.00	Lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah	0	
4	terdapat pajak atas transaksi pengadaan barang jasa yang belum potong pajak	255.000.00	Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah	255.000.00	Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah	bukti stir pajak	255.000.00	Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah	0	
5	KPU Kab. Pandeglang belum menungkat pajak hadiah dalam kegiatan launching dan jalan sehat jilbab Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tidak sesuai ketentuan.	7.334.688.00	Tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah	7.334.688.00	Tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah	bukti stir pajak	7.334.688.00	Tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah	0	
6	Pembayaran honorarium tim kelompok kerja pada KPU Kab. Pandeglang tidak sesuai ketentuan	84.014.000.00	Delapan puluh empat juta empat belas ribu rupiah	84.014.000.00	Delapan puluh empat juta empat belas ribu rupiah	bukti setor pengembalian pajak	84.014.000.00	Delapan puluh empat juta empat belas ribu rupiah	0	
7	Pembayaran honorarium kegiatan pada KPU Kab. Pandeglang belum diterima oleh yang berhak	17.810.000.00	Tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah			bukti pertanggungjawaban PDF	17.810.000.00	Tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah	0	



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabuten Pesisir Selatan sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Saran

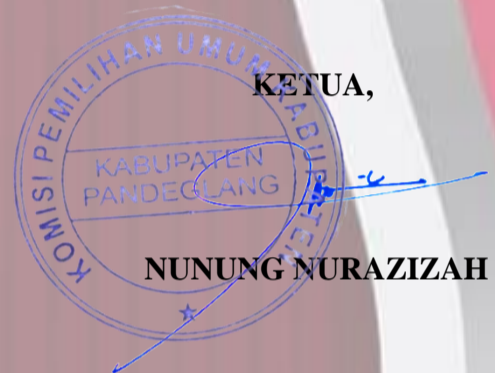
Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabuten Pesisir Selatan, berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/pelatihan formal maupun non formal, antara lain untuk memenuhi kualifikasi pengelolaan keuangan.
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan;
4. Meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang 2023

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang akan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegritas dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun system pengukuran data kinerja secara berkelanjutan, sehingga anggaran berbasis kinerja dapat mewujudkan serta memanfaatkan laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bahan untuk meningkatkan kinerja. Harapan kita adalah agar laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dan kami sangat berterimakasih sekali atas masukan/saran demi kesempurnaan laporan ini.


KETUA,
NUNUNG NURAZIZAH